

**PERTUKARAN SOSIAL PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI DESA BUNTU KAMIRI KECAMATAN PONRANG  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.**



**TESIS**

**SURIADI**

**E032202001**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PERTUKARAN SOSIAL PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI DESA BUNTU KAMIRI KECAMATAN PONRANG  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.**

**Tesis**

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi**

**Sosiologi**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SURIADI**

**E032202001**

Kepada :

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PERTUKARAN SOSIAL PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI DESA BUNTU KAMIRI KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2022**

Disusun dan diajukan oleh

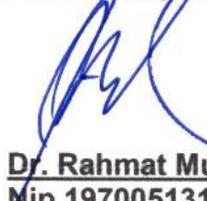
**SURIADI**

E032202001

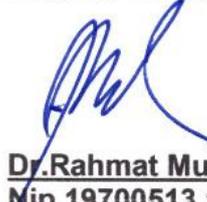
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **4 April 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

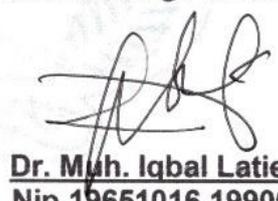
Pembimbing Utama

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
Nip.197005131 199702 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
Nip.19700513 199702 1 002

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si**  
Nip.19651016 199002 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Phil Sukri, S.P.M.Si**  
Nip.19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Suriadi**

NIM : **E032202001**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-banar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Januari 2023

Yang Menyatakan,

  
SURIADI

## ABSTRAK

SURIADI. *Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Muh iqbal Latief),

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami pertukaran sosial pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian In menunjukkan bahwa pada pemilihan kepala desa di Desa Buntu Kamiri ini, pemilih pemula lebih cenderung memilih berdasarkan pendekatan (pertukaran yang bersifat ekstrinsik) dibandingkan pertukaran yang lain, Pemilih pemula memilih calon tersebut hanya karena diberikan iming-iming yang bersifat materi karena pemilih pemula tidak melihat data rekam jejak dan visi misi, akan tetapi lebih melihat calon dari sisi apa yang diberikan bersifat material. Walaupun demikian, ada juga pemilih yang mempertimbangkan aspek rekam jejak calon kepala desa (pertukaran bersifat intrinsik). Pertukaran intrinsik ini lebih menggunakan pendekatan kekeluargaan dan kekerabatan. Jadi, mereka lebih mempertimbangkan hubungan sosial dibandingkan dengan aspek material, maka yang dominan terlihat tampak adanya fenomena antusiasme pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa di Desa Buntu Kamiri adalah, karena adanya pertukaran yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik yang lebih memotivasi pemilih pemula untuk ikut memilih. Adapun aspek-aspek yang memengaruhinya adalah adanya aspek sosial, aspek okonomi, aspek budaya, termasuk karena kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya tentang pentingnya mereka menjalankan kedaulatan rakyatnya, yaitu bebas memilih salah seorang kepala desa sesuai dengan hati nuraninya.

Kata kunci: pertukaran sosial, pemilih pemula, pemilihan kepala desa



## ABSTRACT

SURIADI. *Beginner Restorer Social Exchange in Village Head Elections in Buntu Kamiri Village, Ponrang District, Luwu Regency in 2022* (Supervised by Rahmat Muhammad and Muh. Iqbal Latif).

This study aims to analyze and understand the Social Exchange of Beginner Voters in the Village Head Election in Buntu Kamiri Village, Ponrang District, Luwu Regency in 2022. This study used a descriptive qualitative research method. This research showed that, in the Village Head Election in Buntu Kamiri Village, Beginner Voters were more likely to vote based on an approach (extrinsic exchanges) compared to other exchanges. Beginner Voters chooses the candidate only because they are given material lures, where Beginner Voters do not look at the track record and vision and mission, but rather see the candidate from what is materially given, however, there are also voters who consider aspects track record of candidate for village head (exchange is intrinsic). This intrinsic exchange uses a kinship and kinship approach, so they consider social relations more than material aspects. Then the dominant one that appears to be the phenomenon of enthusiasm of Newbie Voters in the Election of Village Heads in Buntu Kamiri Village is due to exchanges that are extrinsic and intrinsic which further motivates Newbie Voters to vote. As for the aspects that influence it, there are aspects, economic aspects, cultural aspects, including the lack of understanding of the community, especially about the importance of them exercising the sovereignty of their people; namely, being free to choose a village head according to their conscience.

Keywords: social exchange, beginner selector, Village Head Election



## PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul **“Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupten Luwu Tahun 2022”**. Meskipun menempuh proses yang tidak begitu mudah, namun sedianya tetap dapat mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Tesis ini disusun salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam menyusun tesis ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari mereka semua. Oleh karena itu atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Secara khusus penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua saya dalam hal ini, Bapak Kaso Marhuni dan Ibu Suriani karena atas didikannyalah, serta doanya terus mengalir sebagai rasa sayang dan cinta kepada anaknya, nasehat-nasihat serta arahan dan terus memotivasi saya sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Terima kasih kepada Kakak Saya Sukarti, Surtika, dan Adik Saya Kurni, Muhammad Halim yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat membantu kelancaran selama melaksanakan penelitian.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. SC, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Phil Sukri, S.I.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Terima kasih kepada Prof. Hasbi Marissangan, M.Si.,Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. selaku pembimbing I dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi, yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Terima kasih kepada Dr. Iqbal Latief, M.Si. selaku pembimbing II atas segala bimbingan serta arahan-arahan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Drs. Andi Haris, M.Sc.,Ph.D. Selaku penguji I, Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku penguji II dan Dr. Sakaria To Anwar, M.Si selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam penyusunan tesis ini.

9. Terima kasih kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fisip Unhas yang selalu membantu dalam hal pengurusan berkas Penyelesaian Studi S2.
10. Seluruh Dosen di Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan Ilmunya beserta pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
11. Terima kasih kepada Pengurus Formasi, Ahmad Muhajir Periode (2022), Dienul Fajry Periode (2022-2023), Bitu Periode (2023) selaku ketua Formasi dan seluruh jajaran pengurus Formasi.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar saya yang ada di Kabupaten Luwu yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil sehingga saya dapat bersemangat dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah sebagai syarat penyelesaian Studi saya di S2.
13. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik dalam proses pembuatan persuratan izin penelitian.
14. Terima kasih kepada Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat Buntu Kamiri yang telah memberikan pelayanan dengan baik, serta memberikan sedikit banyak informasi dan pengalaman yang menyangkut dalam hal penyusunan penelitian ini.
15. Terima kasih kepada Seluruh Panitia Penyelenggara Pilkades di Desa Buntu Kamiri yang telah memberikan informasi dan

pengalamannya sehubungan masukan data dalam penyelesaian tesis ini.

16. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan jawaban hingga selesainya penelitian ini.

17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Seangkatan Sosiologi (S2) 2020 II: Aryo Sosiawan, Ahmad Muhajir, Sadriani Ilyas, Zakaria Ibrahim, Yusran Suhan, Mohammad Aksyar, Taufiqurrahman Faharuddin, Jamal Mirdad, Arisnawawi, Marta Suharsih, Muhammad Yusran, dan Nurfadillah yang selalu memberikan support dan pengalaman selama proses penyelesaian studi S2.

Penulis menyadari bahwa, dalam hal penyusunan tesis ini, masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu sedikit banyak kritikan dan saran yang tentunya dapat bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya pada umumnya.

Makassar, 17 Februari 2023

Penulis

**Suriadi**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Pemilihan Kepala Desa.....	12
B. Tinjauan Budaya dan Partisipasi Politik.....	15
C. Kajian Perilaku Politik Pemilih Pemula .....	20
D. Teori Yang Relevan .....	27
Teori Pertukaran Sosial (Peter Blau) .....	27
E. Penelitian Terdahulu .....	38
F. Kerangka Pikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	48
C. Teknik Penentuan Informan.....	50
D. Jenis Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisa Data.....	58

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	60
A. Lokasi Penelitian.....	60
B. Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri.....	61
C. Sejarah Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri.....	62
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	63
A. Karakteristik Informan.....	63
B. Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	72
1. Proses Pertukaran Sosial Bersifat Intrinsik.....	74
2. Proses Pertukaran Sosial Bersifat Ekstrinsik.....	79
3. Pertukaran Sosial Bersifat Bauran.....	83
C. Aspek-aspek yang Memengaruhi Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu di tahun 2022.....	96
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	138

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Angka Partisipasi Pemilih.....	08
2. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
3. Gambar, Konsep Kerangka Pikir.....	48
4. Matrix 3.1 Kreteria dan Jumlah Informan.....	53
5. Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	59
6. Tabel 5.1 Data Informan Penelitian.....	71
7. Tabel 5.2 Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	90
8. Tabel 5.3 Aspek-aspek yang Memengaruhi Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	109

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 01. Pertama Pedoman Wawancara.....	128
2. Lampiran 02. Surat Penelitian.....	134
3. Lampiran 03. Dokumentasi Wawancara.....	138

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Desa dalam proses demokrasi di Indonesia adalah merupakan suatu bentuk bagian dasar dari salah satu politik di tingkat lokal yang diselenggarakan di desa. Sebagaimana sejak bergulirnya rezim orde baru tahun 1998 telah menunjukkan bahwa perubahan yang tampak ada pada sistem pengendalian stabilitas politik, di mana struktur pemerintahan yang dianggap lebih relevansi untuk diterapkan adalah pembaharuan konsensus otonomi daerah yang juga menyentuh dan mencakup teritorial hingga pada tingkat otonomi pemerintah desa (Barniat, Zulman, 2019).

Seiring berjalannya perubahan otonomi daerah yang mencakup Pemerintah Desa (Perdes), yang mana demikian pasca diberlakukannya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 menimbulkan problematika baru ditengah jalannya sistem desentralisasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkannya sebagai Dana Desa (DD) bermilliaran diturunkan oleh pemerintah pusat setiap tahun untuk pembangunan di setiap desa, dengan tingginya Dana Desa (DD) tersebut yang diturunkan oleh pemerintah pusat menyebabkan warga masyarakat desa antusiasme menyambut untuk mengambil bagian ikut terlibat berpartisipasi politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung,

diantaranya adalah mencalonkan diri menjadi kepala desa, menjadi sangat tinggi di setiap desa (Tribunnews, 2019).

Secara historis bahwa dahulu sebelum reformasi bergulir, suatu jabatan seorang kepala desa dianggap peranan yang sangat rendah dan bahkan kurang memiliki nilai di mata warga masyarakat desa, baik dalam status sosial, maupun untuk segala fungsi kewenangan yang dapat mengatur dan menata sistem sosial yang ada dalam masyarakat, namun justru hal itu berubah drastis ketika seiring ditetapkannya Dana Desa (DD) yang cukup tinggi sebagai modal pembangunan desa, hal tersebut justru memunculkan berbagai masalah-masalah baru, seperti perebutan kekuasaan dan perebutan jabatan di dalam lingkungan sosial masyarakat desa (Tempo.co, 2022).

Sejak jalannya pemilihan Kepala Desa secara demokrasi, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keterlibatan masyarakat diberikan ruang kebebasan dan perlindungan dalam berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak secara langsung agar menggunakan kedaulatannya untuk memilih dan memutuskan pilihannya tanpa ada mobilisasi oleh elit tertentu pada masyarakat yang diarahkan untuk kelompok kepentingan tertentu saja, maka metode pemilihan secara demokrasi dalam pemilihan kepala desa juga mestinya melibatkan berbagai agen untuk berperan mensosialisasikan sistem demokrasi tersebut, baik lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah yang terkait

dalam desa untuk mengedukasi masyarakat agar sepenuhnya menggunakan haknya sebagai pemilih.

Faktanya bahwa seringkali masyarakat lebih banyak yang memaknakan bahwa kebebasan dalam versi berdemokrasi dipahami sebagai kebebasan yang absolut, kebebasan tanpa aturan secara normatif, berbeda dengan demokrasi yang sebenarnya digaungkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yakni demokrasi yang berasaskan Pancasila. Maka perlu sedianya dalam Pemilihan Kepala Desa badan eksekutif, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan aturan sebagai prasyarat jalannya sistem demokrasi yang dapat dibenarkan oleh negara dan masyarakat secara umum.

Urgensi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tingkat politik desa adalah tentunya sebagai proses kegiatan untuk mengisi kekosongan figur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 tahun berikutnya dan masa pergantian jabatan, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dalam regulasi otonomi daerah, sebagaimana tugas dan wewenang kepala desa yang terpilih, bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan harus secara demokratis, maka diperlukan pemimpin seorang kepala desa yang terpilih melalui legalitas demokrasi dan *acuntabel* agar dapat membawa perubahan desa yang lebih baik, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan pelayanan administratif lainnya (Taufiq, 2020).

Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tentunya tidak lepas dari dukungan oleh seluruh elemen masyarakat dalam desa itu sendiri, di mana masyarakat harus memiliki integritas serta independensi yang cukup baik, baik panitia penyelenggara maupun peserta calon kepala desa itu sendiri, tidak kalah penting adalah elemen dalam kelompok-kelompok masyarakat desa yang tentunya mempunyai kedaulatan untuk memilih. Dalam hal ini, diperlukan adanya partisipasi masyarakat secara sukarela, sehingga memungkinkan bebas menentukan pilihannya tanpa ada dorongan kekuasaan atau elit manapun, karena tinggi rendahnya partisipasi masyarakat desa sangat menentukan kualitas dari pilkades. Namun bagi sebagian masyarakat, adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim sukses menyebabkan menurunnya perhatian masyarakat daripada politik, seperti (golput), dan bahkan apatis terhadap politik (Sofyan, 2021).

Kesadaran perilaku politik warga negara menjadi faktor determinan dalam perilaku politik masyarakat, artinya bahwa sebagai hal yang fundamental setiap individu berhubungan pada tingkat pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban, yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran kadar perilaku seseorang terlibat dalam proses politik. Apabila individu memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah cukup tinggi, maka perilaku politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat

rendah, maka perilaku politik menjadi pasif dan apatis terhadap sistem politik (Raoda Nur dkk, 2015).

Masyarakat diharapkan dapat menarik keputusan sendiri secara kritis dan bebas memilih pemimpin desa yaitu kepala desa justru menjadi bentuk transaksional antar pertukaran jasa oleh elit kekuasaan, hal tersebut terjadi dipermukaan karena sudah menjadi pola kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap wajar dilakukan, seperti berharap mendapatkan sembako, uang, atau pun menunggu hadiah yang lain seperti jabatan yang lebih besar dari setiap calon kepala desa tersebut. (Ciptono, 2019).

Fakta-fakta empiris mudah ditemukan dalam pemilihan Kepala Desa atau pun pemilihan lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa budaya praktik transaksional dalam sistem demokrasi sudah sangat mengakar digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dalam jabatan. Kekhawatiran itu mulai banyak terkuat karena justru yang melakukan adalah tidak hanya melibatkan individu atau pun sekelompok masyarakat yang masih awam dalam dunia pengetahuan akademik, namun lebih cenderung dilakukan oleh individu atau pun kelompok yang berstatus pelajar dan mahasiswa.

Jika kita melihat secara umum bahwa merujuk pada UU Pemilu Tahun 2008, syarat untuk dalam memilih adalah mereka yang sudah berumur 17-21 tahun, artinya dengan rentan usia yang masih sangat muda dan dikategorikan pemilih yang masih tidak cukup berpengalaman

dalam memilih calon kepala desa, sudah semestinya mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik melalui lingkungan sosial tempat tinggalnya sendiri, seperti lingkungan keluarga sebagai agen internal individu untuk memberikan pengetahuan secara langsung, adapun yang lainnya adalah pendidikan formal, pemerintah dan tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat adalah media untuk memberikan sosialisasi politik yang benar.

Sudah semestinya bahwa, insan akademis sangat wajib dan berhak untuk ikut terlibat dalam memengaruhi sistem kebijakan yang lahir dari pemilihan kepala desa tersebut, juga tidak kalah penting adalah bagaimana peran serta memberikan kontribusi terkait tujuan berdemokrasi dan berpolitik secara sehat, sehingga menjadi warisan pendukasian yang berwawasan dapat menciptakan pemimpin yang mampu membawa perubahan yang lebih baik kedepannya. Jadi urgensi pemilih pemula ini dalam pemilihan kepala desa adalah tentunya sangat perlu diperhatikan guna mendapatkan pertumbuhan pendidikan politik khususnya dalam edukasi memilih pemimpin dengan berdasarkan perspektif tujuan untuk memilih pemimpin dalam desa.

Sehubungan Pemilihan Kepala Desa di tahun 2022, Sulawesi selatan tercatat oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Nurjani, mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sedianya ada di 13 kabupaten dengan total sebanyak 701

desa. Namun, dua kabupaten yakni Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sinjai harus ditunda ke tahun 2022 terkait pandemic Covid -19 yang masih tinggi, dan sementara ada 11 kabupaten yang tetap melaksanakan pilkades di tahun 2021 (Koran Sulses.id, 2022).

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu mengikuti (Pilkades) serentak sebanyak 91 desa pada tanggal 24 Maret 2022, salah satunya adalah Desa Buntu Kamiri yang memiliki partisipasi pemilih sebanyak 1.983 Jiwa, memiliki tiga 3 kandidat sebagai calon Kepala Desa (Kades), masing-masing memiliki sumber daya yang cukup ketat untuk bertarung dalam memenangkan pemilihan kepala desa, bahkan perhelatan politik calon kepala desa melibatkan para tokoh dalam desa untuk berkampanye diantaranya, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, dan bahkan keterlibatan para elit politisi sebagai militansi dan basis massa yang tidak luput dari jangkauan strategi pemenangan calon kepala desa tersebut.

Sementara itu, pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih pemula tercatat di Desa Buntu Kamiri memiliki partisipasi Pemilih Pemula 230 jiwa, maka hal demikian, jumlah Pemilih Pemula di Desa Buntu Kamiri tersebut dianggap sangat berpengaruh untuk keputusan akhir pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun ini, Pemilih Pemula mempunyai nilai signifikan pada suatu hasil keputusan perolehan suara untuk masing-masing pemenangan calon kepala desa. Berikut adalah jumlah keseluruhan Pemilih Pemula yang di kategorikan masuk

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memilih, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Buntu Kamiri tahun 2022 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

Angka partisipasi pemilih

Lokasi Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa	Pemilih Pemula	Jumlah, Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Buntu Kamiri	230	1.983

Sumber Data: Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Melihat data di atas, partisipasi Pemilih Pemula memiliki data yang cukup tinggi untuk mendapatkan posisi signifikan dan strategis pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri, artinya dalam pemilihan kepala desa di Desa Buntu Kamiri kecenderungan Pemilih Pemula bisa menjadi sentra yang mudah didapatkan oleh tim sukses untuk dimobilisasi hak suara mereka dengan cara-cara yang mampu memikat para Pemilih Pemula tersebut, seperti pemberian iming-iming berupa barang dan uang yang dijanjikan oleh calon kepala desa.

Kategori kelompok Pemilih Pemula merupakan generasi yang baru mau menginjak umur menuju pendewasaan diri, yang mana demikian, karakter dan sifatnya masih sangat rentang mengalami (*swim voter*) atau sikap yang mudah berubah-ubah, dengan kata lain memiliki sifat yang masih labil. Maka kelompok Pemilih Pemula ini sebagai regenerasi yang terus bertumbuh, baik dalam sikap dan perilaku, pengetahuan, bila tidak

menjadi dasar diberikannya pembelajaran yang baik, akan menghadapi tantangan yang sangat berat, khususnya pada perubahan politik itu sendiri, yang mana makin kedepan akan lebih dinamis dan modern, boleh dikatakan bahwa pemuda sebagai (*leader of change*) dapat turut andil dalam menanamkan stigma kepada masyarakat bahwa Pemilihan Kepala Desa serentak ini harus dilakukan secara sehat tanpa adanya politik uang (*money politict*) ataupun uang sogokan saat pencoblosan. (Kurniasih, 2020).

Fenomena yang terjadi adalah peneliti melihat keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa khususnya di Desa Buntu Kamiri memiliki (*spirit*) yang tinggi, mereka sangat antusias merespon dinamika politik desa, dalam hal pemilihan pemimpin menjadi kepala desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022, baik dalam partisipasinya memberikan suara secara langsung, atau pun datang ke (TPS) lebih awal, dan menunggu perhitungan selesai.

Maka dengan fenomena tersebut menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih jauh dengan judul "**Pertukaran Sosial Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kacamatan Ponrang Kabupaten Luwu Tahun 2022**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah pada studi kasus pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu di tahun 2022?
2. Aspek-aspek apa saja yang memengaruhi Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu di tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tahun 2022.
2. Untuk menganalisis aspek-aspek apa saja yang memengaruhi Pertukaran Sosial Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di tahun 2022.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang bagaimana Pertukaran Sosial Pemilih Pemula.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pun rujukan pada penelitian yang menganalisis Pertukaran Sosial Pemilih Pemula.

3. Penelitian ini dapat membawa kontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi politik melalui pendekatan psikologi dan sosiologis.

#### **Kegunaan praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi guna menciptakan perpolitikan yang mampu membawa pemahaman tentang pentingnya kesadaran diri pada perilaku politik dalam melahirkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan masyarakatnya.
2. Penelitian ini juga dapat membawa ketaraturan sistem sosial yang dapat mendukung mewujudkan tataran perpolitikan di desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membawa kontribusi yang penting untuk pemerintah agar bisa mengantisipasi terjadi dan dampak perilaku politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan untuk menjadi penggerak dan mengontrol masalah sosial dalam masyarakat, di samping itu proses demokratisasi juga akan terus berfungsi sebagai atribut negara, sebagaimana dikemukakan oleh (Ramadani d. , 2018, hal. 40) bahwa pemilihan kepala desa merupakan wujud sistem politik demokrasi, karena dalam pemilihan kepala desa terdapat partisipasi masyarakat dan kebebasan untuk memilih yang dikehendakinya sendiri.

Secara historis, Pemilihan Kepala Desa telah mengalami transformasi sosial, mulai dari zaman feodal (kerajaan) masa kolonial, masa orde lama, di susul masa orde baru, yang kemudian mengalami masa transisi menuju sistem demokrasi. Pada zaman feodal atau (kerajaan), kepala desa ditunjuk langsung oleh adipati agar dapat melindungi tanah kerajaan, maka kepala desa dipilih oleh adipati adalah seorang yang memiliki kemampuan yang lebih untuk menjabat sebagai kepala desa, sebagaimana otoritas kewenangannya dapat mengurus tanah dan menarik pajak, memonopoli kekuasaan, dan dapat menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam wilayahnya, dalam praktek ini adipati atau raja bebas menunjuk menjadi salah seorang untuk menunjuk menjadi kepala desa (*Kabar banten, 2018*).

Berbeda pada zaman kolonial, peran dan kedudukan kepala desa berubah, yang awalnya hanya mengurus pada bidang ekonomi juga bergeser untuk mengurus bidang politik dan administratif pemerintahan desa. Undang-Undang yang dibuat oleh kolonial belanda dinamakan Regering Reglement (RR) Tahun 1854, adapun mekanismenya, yang pertama, diberlakukan pemilihan kepala desa secara terbuka, masing-masing pendukung atau pemilih calon kepala desa membuat barisan adu panjang, dan cara kedua adalah pemilihan kepala desa dengan mekanisme sistem tertutup atau rahasia, setiap pemilih mendapat satu biting yang akan dimasukkan ke dalam bumbung bambu yang tersedia pada bilik, masing-masing bumbung tersebut ditandai dengan simbol hasil palawija, pemilihan dilakukan secara langsung oleh seluruh penduduk desa yang dianggap sudah dewasa atau sudah mengetahui dalam kecakapan hukum (Kuninganmas, 2021).

Selanjutnya pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengubah produk Undang-Undang Regering Reglement (RR) kolonial belanda yang ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, namun banyaknya kesulitan pada tahun tersebut, sehingga produk Undang-Undang pemerintah kolonial belanda masih tetap digunakan. Tata cara pelaksanaan (Pilkades) pada waktu itu menggunakan pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara, dikarenakan angka buta huruf masih tinggi, maka calon kepala desa tetap diidentitaskan dengan gambar hasil bumi atau palawija, cara

penghitungan (voting) suarapun tetap calon mendapatkan suara terbanyak dialah menjadi kepala desa Masa Orde Baru tahun 1979-1999, sistem pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, dalam Undang-Undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang IGO dan IGOB yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah belanda, dalam perundangan disebutkan, bahwa desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Sedangkan kelurahan tidak mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, karena kelurahan adalah pegawai negeri pemerintah daerah, maka dalam hal ini, pemilihan kepala desa dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, sedangkan kepala kecamatan tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun dipilih langsung oleh Bupati atau Wali Kota atas nama Gubernur, di dalamnya tertuang pada pasal 93 sampai dengan 111 mengenai pemerintahan desa.

Pada era reformasi, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terjadi perubahan mendasar, yaitu mengubah skema sentralisasi menjadi desentralisasi yang tampak jelas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dalam hal ini terjadi perubahan dalam hal pengertian desa yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat setempat, kemudian masa jabatan kepala desa dibatasi hanya sampai delapan tahun.

## B. Tinjauan Budaya dan Partisipasi Politik

Budaya Politik, dilihat dari secara etimologis budaya politik terdiri dari dua kata, kata yang pertama, berasal dari kata sansekerta yakni *buddaya*, yang merupakan bentuk jamak "*Buddhi*" yang berarti budi atau akal, *Budhaya* atau kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, atau akal. Ada pun dalam bahasa Inggris, *Culture* atau bahasa asing adalah *cultus*, yang artinya sama dengan budaya atau kebudayaan.

Menurut E.B Taylor dalam (Sahid, 2011, hal. 147) mengartikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup segala sesuatu yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Maka berdasarkan batasan ini, berarti kebudayaan terdiri atas segala perilaku yang normatif atau yang mencakup segala cara-cara atau pun pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.

Sementara politik merupakan kata yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mana politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*polis*" atau kota, negara kota, *polis* berkembang ke konsep *politicos* yang berarti kewarganegaraan. Plato dan Aristoteles seperti yang dikutip oleh Budiarto menganggap "*politicks*" sebagai suatu

usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. (Budiaro, 2007, hal. 14).

Menurut Budiarjo, salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya Politik mengutamakan psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu-individu, yang mana beroperasi dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapan politik yang memilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. (Sumintapura, 1998, hal. 23)

Menurut Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beraneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap warga negara yang di dalam sistem itu (Almond, 2005, hal. 03). Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi, berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri lebih khas yang melekat dalam sistem sosial kemasyarakatan suatu bangsa dalam wadah negara. Istilah budaya politik

meliputi persoalan legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan umum yang dibuat pemerintah. Pendekatan budaya politik pernah dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Gabriel A. Almond, dan Sydney Verba, kemudian hasil penelitiannya tersebut dimasukkan dalam judul buku yang di beri judul Budaya Politik, atau (*Political Culture*) di tahun 1969 hingga 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di beberapa negara, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, Jerman (Kolip, 2015, hal. 95).

Dari realitas budaya politik yang berkembang di masyarakat, Gabriel Almond mengkasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya Politik Parokial (*parochial political culture*)

Yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif, seperti tingkat pendidikan relatif rendah.

2. Budaya Politik Kaula (*subyek political culture*)

Yaitu tingkat partisipasi politiknya relatif maju, baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

3. Budaya Politik Partisipan (*participant political culture*)

Yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran masyarakat terhadap politik sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik merupakan kajian budaya politik dalam perubahan politik yang terjadi di dalam masyarakat, di mana suatu kondisi dalam masyarakat yang menyangkut pada kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan politik, di dalam

lingkungannya. Konsep budaya politik mengarah pada suatu sikap yang secara antropologis memberikan penekanan pada pola pikir, perasaan, dan sikap manusia dalam melihat perubahan dalam kehidupan sosial politik. Pada definisi yang lain, budaya politik adalah hasil dari reflektivitas individu, yang diakui sebagai suatu realitas kehidupan sosial politik dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Nurlinda, 2019), Budaya politik pada tingkat lokal seperti dalam pemilihan kepala desa di Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, di temukan hasil bahwa, budaya politik dalam masyarakatnya terdapat beragam bentuk, yang pertama, budaya politik parokial, yakni masyarakat dalam pemilihan kepala desa bersifat apatis atau tidak tertarik dalam pemilihan, kemudian yang kedua, budaya politik kaula, masyarakat hanya ikut-ikutan saja tanpa memperdulikan siapa sebenarnya yang memenangkan, ketiga budaya politik partisipan, yakni masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan secara antusias dalam memilih.

Secara prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Dalam acuan tersebut menimbulkan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak hanya ditangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga ditangan masyarakat desa tersebut.

Partisipasi politik bisa diartikan sebagai konsep aktivitas dalam politik yang diikuti berbagai elemen masyarakat di dalamnya guna mencapai tujuan bersama yakni memilih pemimpin, baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah, sampai pada Pemilihan Kepala Desa, yang mana demikian, masyarakat diharapkan dapat memberikan hak suaranya dengan kesadaran politiknya sendiri. Sebagaimana partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. (Nawawi, 1995, hal. 39)

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Menurut Herbert McClosky menarik pendapat bahwa, “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan” (*the term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*). Secara umum, partisipasi politik adalah kemampuan masyarakat dalam memengaruhi

suatu kebijakan secara langsung atau pun tidak secara langsung, maka hal itu sangat menekankan kesadaran individu di dalam kelompok masyarakat yang tersusun kedalam sebuah sistem keputusan akhir di dalam sebuah pemilihan pemimpin kekuasaan. (Nelson, 1994, hal. 01)

### **C. Kajian Perilaku Politik Pemilih Pemula**

Terkait dengan perilaku politik hingga perkembangannya pada masa kontemporer. Dalam buku Ihsan Hamid Perilaku Politik, menerangkan, bahwa munculnya aliran perilaku politik (*political behavior*) telah melalui sejarah panjang terhadap berbagai dinamika dan pergulatan pemikiran politik. Berawal sejak pertengahan tahun abad ke-19 analisis politik sudah mulai didominasi oleh sejarah ilmiah, yang mencerminkan dampak semakin meningkat dalam aliran positivisme itu sendiri. Hal ini ditandai dengan terus menggeliatnya kuliah-kuliah saint politik yang sebelumnya sekitar tahun 1870-an sudah mulai diperkenalkan di universitas di Oxford, Paris dan Colombia diterbitkan untuk menjadi media pengembangannya. (Hamid, 2020, hal. 05)

Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (struktural functional analysis), David Easton (general systems analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), David Truman, Robert Dahl, dan

sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. (Budiarjo, 2008, hal. 10)

Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma dalam (Mufti, 2012, hal. 87) memberikan catatan penting mengenai perilaku politik yaitu: Pertama, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Menurut (Ramlan, 2007, hal. 131), bahwa secara mendasar perilaku politik dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Hal demikian yang diterangkan Ramlan Subakti bahwa, sebagai hasil keputusan masyarakat itu sendiri menjadi keputusan akhir yang secara langsung diterima masyarakat sebagai cerminan perilaku politiknya melalui proses kegiatan politik yakni pemilihan umum.

Menurut (Sudijono, 1995, hal. 03) perilaku politik merupakan satu kegiatan warga negara dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik juga berhubungan dengan tujuan masyarakat, kebijakan dalam mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut Sastroatmojo mendefinisikan perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik masih ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut yakni tujuan masyarakat secara umum. (Sastroatmojo, 1995, hal. 02-03).

Menurut (Subakti, 2010, hal. 20) perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. (Ramlan Subakti, 2010, .hal. 21) menjelaskan, bahwa yang dapat melakukan kegiatan politik ialah pemerintah (lembaga dan peranannya) dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik.

Perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok-kelompok). Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua tidak berwenang seperti yang pertama, tetapi berhak memengaruhi pihak yang pertama dalam menjalankan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua.

Kegiatan politik, pihak kedua ini disebut partisipasi politik. Pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik itu secara formal seperti seseorang yang termasuk dalam keanggotaan di dalam organisasi publik (seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, adapun kelompok informal yang ada seperti kelompok-kelompok kecil (keluarga, pertemanan, kelompok belajar dan lainnya). Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting guna memahami perilaku politik dimasyarakat, mengapa hal tersebut sangat penting dikarenakan kelompok-kelompok tadi formal maupun informal, mempunyai peranan dan bagian yang besar dalam bentuk persepsi, sikap, dan orientasi seseorang.

Dapat dilihat bahwa keanggotaan seseorang dalam organisasi formal maupun informal tertentu dapat memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan, contohnya pemilihan kepala desa. Hal diatas terjadi dikarenakan seringnya keterlibatan individu tersebut dalam kelompok yang di dalamnya mereka berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan timbulnya pemikiran-pemikiran yang sama untuk mendukung salah satu dari calon.

#### 1. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dapat dikaitkan dengan adanya proses pemilihan umum di suatu negara atau daerah tertentu baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro. Sementara untuk lebih jelasnya, Surbakti mendefinisikan perilaku pemilih sebagai aktivitas pemberian suara oleh

individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Pendapat diatas, semakin memperjelas bahwa perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan proses pemilihan umum, karena berkaitan dengan sikap memilih atau tidak memilih seseorang. Adapun beberapa bentuk atau jenis perilaku pemilih yang dimaksud yakni dapat meliputi kegiatan pemilih pada saat proses kampanye, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara atau apabila dalam konteks Indonesia disebut pemilihan umum. Perilaku memilih ini ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah.

## 2. Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan

kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/ Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena banyak jumlah pemilih dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah menentukan, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Menurut. (M. Rusli Karim, 1991, hal. 32) menjelaskan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit untuk didikte, bahkan ada dugaan generasi

muda adalah salah satu kelompok yang sulit untuk didekati partai politik maupun kontestan Pemilu. Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai sehingga pada umumnya pemilih pemula cenderung akan mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya.

M. Rusli Karim (1991: 33) Pemilih pemula merupakan objek dan subjek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih Pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya agar ke depan dapat berperan dalam bidang politik.

Mereka sebagai penerus bangsa harus memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara.

Menurut (Suhartono, 2009, hal. 07) menjelaskan pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Di samping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Dengan demikian

meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia untuk ke depan.

#### **D. Teori Yang Relevan**

##### **Teori Pertukaran Sosial (Peter Blau)**

Biografi yang disajikan di sini diolah dari buku *Teori Sosiologi* karya George Ritzer dan Douglas Goodman dan W. Richard Scott dan Craig Calhoun. Peter Michael Blau lahir di Wina, Austria, pada tanggal 7 Pebruari 1918 ketika kekaisaran Austro-Hungaria jatuh. Dia adalah seorang anak dari orangtua Yahudi sekuler dan menyaksikan dengan keprihatinan yang mendalam ketika fasisme berkuasa di Austria pasca perang. Sebagai mahasiswa muda dia menulis artikel untuk koran bawah tanah milik Partai Buruh Sosialis yang menentang pemerintahannya yang refresif. Ketika usianya baru 17 tahun dia dihukum 10 tahun penjara di penjara federal dengan tuduhan penghianatan. Ironisnya, dia segera dibebaskan setelah itu ketika Partai Nasionalis berkuasa dan larangan bagi aktivitas politiknya dicabut.

Pada tahun 1939, ketika Hitler mulai masuk ke Wina, ia beremigrasi ke Amerika Serikat dan secara resmi menjadi warga negara AS pada 1943, sebelumnya pada tahun 1942 Blau memperoleh gelar Sarjana Muda dari Universitas Elmhurst College, di Elmhurst, Illinois. Ini adalah sebuah Universitas yang tidak terlalu terkenal. Pendidikan selanjutnya tertunda sejenak ketika ia menjalani dinas militer di Angkatan Bersenjata AS pada masa perang Dunia II. Atas partisipasinya di dinas militer AS

tersebut Blau mendapat penghargaan berupa medali *Bronze Star*. Setelah perang selesai, Blau melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Doktor dari Universitas Columbia pada tahun 1952. Setelah sempat memperoleh kedudukan akademis di Universitas Cornell dan Universitas Chicago, Blau akhirnya kembali lagi ke Universitas Columbia.

Dalam kehidupan keluarganya, diketahui bahwa Blau menikah dua kali. Dari istri pertamanya, Zena Smith Blau, dia memiliki seorang putri yang bernama Pamela. Sedangkan dari istri keduanya, Judith Blau, juga karunia seorang putri bernama Reva. Sumbungan Blau dalam bidang sosiologi yaitu studinya tentang organisasi formal yang didasarkan atas studi-studi empiris dan juga buku-buku teksnya banyak yang dikutip.

Blau juga menjadi kontributor tetap dalam bidang organisasi formal sampai ia meninggal pada tahun 2002. Ada juga buku yang ditulis bersama dengan Otis Dudley Duncan dengan judul *The American Occupational Structure*. Buku ini memenangkan *Sorokin Award* pada tahun 1968. Ini adalah sebuah penghargaan prestisius dari Asosiasi Sosiologi Amerika. Karya ini dianggap memberikan kontribusi yang sangat penting bagi studi stratifikasi sosial dalam sosiologi. (Blau, 1997)

Blau memiliki karya yang sangat banyak dalam berbagai bidang. Namun dalam teori Sosiologi Blau memiliki sumbangsih yang orientasinya berlainan. Pada tahun 1964 Blau menerbitkan bukunya yang berjudul *Exchange and Power in Sosial Life*. Buku ini merupakan komponen utama dari pertukaran kontemporer. Dalam buku tersebut mengambil teori

pertukaran pada level mikro dan menerapkannya pada isu-isu level makro. Walaupun ada berbagai kelemahan yang menonjol, namun ini adalah sebuah upaya penting untuk mengintegrasikan secara teoritis isu-isu sosiologi makro dan sosiologi mikro.

Ketika menjabat sebagai presiden Asosiasi Sosiologi Amerika antara tahun 1973-1974, Blau menjadikan teori struktural sebagai tema pertemuan tahunan dari asosiasi ini. Blau juga banyak menerbitkan artikel dan buku yang isinya menjelaskan dan memperluas teori struktural. Buku *Structural Contexts of Opportunities* yang terbit pada tahun 1994 dan edisi kedua dari *Crosscutting Social Circles* yang terbit pada tahun 1997 adalah buku-buku yang ditulis dengan maksud tersebut. Peter Blau meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2002.

Gagasan Peter M. Blau tentang Teori Pertukaran Sosial ini didasarkan pada tulisannya yang dipublikasikan dalam *The American Journal of Sociology* pada Juli 1977 dan buku Teori Sosiologi karangan Doyle P. Johnson yang diterjemahkan oleh Lawang. Pemikiran Blau tentang teori pertukaran sosial secara eksplisit menunjukkan ketergantungan antara pertukaran pada level mikro seperti yang dikemukakan Homans dengan (munculnya) struktur sosial pada level makro. Fokus perhatiannya adalah pada struktur hubungan yang timbul dari sebuah transaksi pertukaran. Dengan demikian Blau hendak menunjukkan bahwa dari proses pertukaran dasar yang dijelaskan oleh Homans, muncul gejala dalam bentuk struktur yang lebih kompleks.

Dalam menjelaskan posisinya, Blau menyatakan bahwa pertukaran sosial yang dia maksudkan terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung dari reaksi dari orang lain. Apabila reaksi itu tidak kunjung datang maka tindakan-tindakan itu terhenti. Jadi Blau memperkenalkan suatu model pertukaran di mana sebuah tindakan tidak hanya didorong oleh kepentingan diri yang sempit. Apapun bentuk tindakan, termasuk yang bersifat altruistik, memerlukan adanya dukungan sosial yang disebut imbalan, jadi kecenderungan untuk membantu orang lain termotivasi oleh harapan bahwa hal tersebut akan imbalan sosial. Untuk itu pada imbalan tersebut maka seseorang perlu menekan keinginan egoistiknya. Dalam pertukaran sosial model Blau, sesuatu yang dipertukarkan menjadi penting bukan karena memiliki nilai ekonomis tetapi karena menunjukkan komitmen emosional (atau lebih tepatnya komitmen moral). Sampai di sini Blau membedakan antara pertukaran Ekstrinsik dan pertukaran Intrinsik.

#### **a. Pertukaran Bersifat Ekstrinsik**

Dalam pandangan Blau suatu pertukaran akan bersifat ekstrinsik apabila hanya berfungsi sebagai alat untuk imbalan yang lainnya dan bukan hubungan itu sendiri. Jadi dalam pertukaran yang ekstrinsik suatu imbalan memiliki kemungkinan untuk terlepas dari hubungan pertukaran, pertukaran ekstrinsik ini dapat ditemukan dalam setiap pasangan yang melakukan proses pertukaran. Contoh konkret dari pertukaran yang ekstrinsik ini dapat dilihat dari setiap transaksi ekonomi.

#### **b. Pertukaran Bersifat Intrinsik**

Sedangkan Pertukaran bersifat intrinsik bersal dari dalam hubungan itu sendiri. contohnya dalam hubungan percintaan di mana sebuah pasangan yang bertukar hadiah tidak melihat pada nilai ekonomis dari hadiah yang dieprtukarkan tapi makna hadiah itu.

Menurut Blau pertukaran ekstrinsik sejajar dengan pertukaran ekonomi, sedangkan pertukaran intrinsik sejajar dengan pertukaran sosial, Dengan demikian dalam beberapa aspek kedua jenis pertukaran ini berbeda dengan satu sama lain. Perbedaan utamanya terletak pada prosesnya. Dalam ekonomi terjadi negosiasi dan tawar-menawar yang disengaja. Sedangkan dalam pertukaran sosial hal itu tidak terjadi. Dengan demikian keaslian dalam banyak imbalan sosial tergantung pada tidak adanya unsur kesengajaan yang disepakati, jadi ketika suatu imbalan sosial mulai dipertanyakan hubungan atau gangguan terhadap keseimbangan komitmen secara timbal balik.

Perbedaan antara pertukaran eksrinsik dan intrinsik mesti dilihat dalam suatu kontinuitas. Sebabnya adalah dalam banyak proses pertukaran terjadi percampuran antara imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Maksudnya yang terjadi adalah kombinasi antara keduanya. Misalnya dalam hubungan perkawinan. Ketika seseorang memilih pasangan, ia menggunakan kreteria tertentu baik secara fisik, ekonomi, sosial dan sebagainya. ia juga membandingkan pasangan dengan orang lain yang mungkin dapat menjadi pilihannya. Di sini pertukarannya bersifat ekstrinsik, tetapi setelah menikah kereteria yang diterapkan sebelumnya

termasuk perbandingan pasangannya dengan orang lain menjadi tidak relevan lagi. Yang terjadi adalah berkembangnya suatu pertukaran yang luas dan unik secara total dengan melibatkan emosi dan komitmen yang kuat dalam hubungan pertukaran tersebut. Dengan demikian terjadilah pertukaran intrinsik.

Trasformasi dari pertukaran ekstrinsik menjadi intrinsik hanya dapat terjadi apabila seseorang memiliki tingkat kebebasan tertentu untuk membuat pilihan. Dalam menentukan pilihan tersebut seseorang memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan inilah konsep biaya dan imbalan atau penghargaan memainkan peranan penting. Artinya seseorang akan tertarik berhubungan dengan mesti ada rangsangan tertentu, rangsangan tersebut bersifat imbalan, dalam pertukaran sosial tawaran akan imbalan tersebut tidak dilakukan dengan sadar.

Dalam upaya merangsang orang lain untuk mau berhubungan dengan seseorang dapat timbul suatu dilema. Hal ini terjadi ketika upaya untuk menjadi menarik agar orang lain mau berhubungan dengannya karena justru melewati ambang batas biasa. Akibatnya orang enggan berhubungan dengannya karena takut pada kemungkinan adanya biaya yang tinggi dalam hubungan tersebut. Biaya tersebut dapat berubah ketergantungan maupun posisi subordinasi. Hal yang ironis di sini adalah kualitas seseorang yang membuatnya menarik dapat menghalanginya untuk memperoleh hubungan yang diharapkan.

Untuk mengatasi masalah ini maka yang perlu dilakukan adalah memberikan imbalan yang tinggi dengan biaya rendah, salah satu caranya adalah dengan menunjukkan diri seorang yang *low profile* atau mengesankan. Upaya ini secara tersirat menunjukkan bahwa pentingnya keseimbangan dalam sebuah proses pertukaran. Artinya sebuah pertukaran akan dikatakan seimbang ketika biaya dan imbalan yang ditukarkan memiliki nilai yang kurang lebih sama, entah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian norma timbal balik menjadi penting. Maksudnya keuntungan yang telah orang lain mesti dibalas.

Tindakan balas membalas-mebalas imbalan memang tidak terjadi dalam satu waktu. Dalam pertukaran sosial, jarak waktu dalam membalas suatu imbalan bersifat memperkuat hubungan antara dua pihak. Hal itu merupakan dorongan dan rangsangan agar hubungan tetap dipertahankan. Orang yang telah memberikan imbalan ini mempertahankan hubungan karena tahu bahwa apa yang telah ia berikan akan dibalas. Sedangkan orang yang menerima imbalan lebih besar di masa akan datang apabila membalas itu.

Tingkatan persamaan antara pihak-pihak yang melakukan proses pertukaran dapat terjadi apabila ada keseimbangan dalam hubungan mereka. Tetapi dalam kenyataan riil, sering terjadi ketidakseimbangan. Apabila demikian terjadi maka terjadi ketimpangan hubungan. Orang yang ingin memperoleh sesuatu dari orang lain tetapi tidak memiliki imbalan

yang sesuai untuk ditawarkan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar memperoleh apa yang diharapkan. Di sini muncul kekuasaan dari pihak penerima imbalan. Pada titik ini teori pertukaran Blau beralih dari level mikro ke makro.

### **c. Lahirnya kekuasaan**

Perbedaan dalam suatu proses pertukaran mengakibatkan munculnya perbedaan status. Pihak yang memberikan status lebih tinggi adalah pihak yang memberikan keuntungan yang lebih besar dan tidak dapat dibalas oleh penerima. Inilah disebut sebagai posisi pertukaran yang tidak seimbang, karena tidak seimbang maka penerima berada dalam posisi subordinasi. Mereka pasti menyesuaikan diri dengan tuntutan pihak pemberi agar dapat terus menerima apa saja yang dibutuhkan. Dengan kata lain pihak penerima berkewajiban untuk menyesuaikan dirinya dengan kemauan tuntutan atau pengaruh dari pihak pemberi.

Kenyataan ini menarik pihak-pihak yang memiliki kelebihan sumber daya maupun sifat yang mampu memberi imbalan dan menawarkan berbagai pelayanan atau hadiah secara sepihak. Tujuannya adalah untuk menegaskan status sosialnya yang tinggi atau menunjukkan kekuasaannya pada pihak lain. Dalam upaya untuk mencapai tujuannya mereka memberikan sesuatu sebanyak-banyaknya kepada pihak lain untuk menciptakan utang dari pihak penerima bertujuan sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan dari pihak yang lain.

Apabila seseorang tidak mau berada dalam posisi subordinasi melalui ketergantungan atau utang maka ada beberapa cara yang dilakukan *pertama* adalah untuk menerima pemberian yang tidak dapat dibalas walaupun dengan resiko tidak mendapat apa-apa. *Kedua*, berusaha untuk sumber-sumber lain dengan nilai yang sama. Hal ini akan menimbulkan saling ketergantungan dan bukan ketergantungan secara sepihak. *Ketiga*, mencari apa yang dibutuhkan pada alternatif-alternatif lain di mana ada peluang untuk membangun hubungan saling ketergantungan. *Keempat*, menggunakan menggunakan kekerasan berupa paksaan fisik atau merampasnya dari pihak yang memiliki sumber-sumber itu. Apabila keempat cara ini tidak digunakan maka satu-satunya yang terjadi adalah menerima tersubordinasi.

Menurut Blau, proses ini pun terjadi dalam organisasi yang lebih besar. Dalam tiap organisasi ada pemimpin dan yang dipimpin. Apabila kepemimpinan seseorang dinilai sukses maka hal itu dianggap sebagai imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian balasannya orang-orang yang dipimpin memberikan dukungan kepada pemimpin tersebut. Akibatnya kekuasaan sang pemimpin semakin bertambah besar dan langgeng. Dengan kata lain, sukses sang pemimpin akan menghasilkan sukses berikutnya, jadi kekuasaan seseorang diperbesar karena ia menjadi pemimpin. Dalam kasus-kasus tertentu seorang pemimpin mungkin akan memberikan hadiah yang banyak dan

berlimpah kepada orang-orang yang dipimpinnya secara berlebih-lebihan agar menciptakan utang budi yang tidak mungkin dibayar.

Dalam kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya memiliki keterlibatan pribadi model struktur pemimpin ini akan muncul. Sedangkan apabila anggota-anggota kelompok tidak memiliki tujuan kelompok atau menggunakan empat cara di depan untuk menghindari diri dari posisi subordinasi, model struktur pemimpin ini tidak cocok. Di sini kegiatan anggota-anggota kelompok menjadi tidak jelas sehingga tenaga terbuang percuma karena tidak ada pusat perhatian bersama.

Dalam organisasi yang memiliki yang terstruktur, ada proses-proses tambahan. Tujuannya adalah untuk menstabilisasikan struktur kepemimpinan itu. Proses dimaksud terdiri dari perkembangan nilai-nilai dan norma-norma bersama untuk memberikan legitimasi terhadap struktur kepemimpinan tersebut. Hasilnya pemimpin dipandang memiliki hak untuk mengharapkan kepatuhan dari orang-orang yang akan dipimpinnya tetapi ia sendiri tidak memberikan imbalan yang pantas. Jadi kekuasaannya menjadi pihak yang memiliki otoritas terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan. Dengan otoritas ini pemimpin mampu menuntut ketaatan orang-orang yang dipimpinnya ketika ada gangguan dalam memberikan imbalan.

Untuk mempermudah suatu kelompok mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, legitimasi struktur kepemimpinan melalui nilai dan norma memiliki peranan yang sangat penting. Bahkan kadang-kadang tuntutan

memperoleh tujuan jangka panjang menuntut penundaan kepuasan saat ini. Dengan nilai dan norma maka seorang pemimpin akan mampu meyakinkan anggota-anggota kelompok untuk mengeluarkan biaya tanpa imbalan langsung. Paling-paling imbalan yang langsung, diterima hanya berupa kepuasan internal dan kepercayaan sosial yang merupakan hasil konformitas normatif. Anggota kelompok juga dapat memperkuat pemimpin dengan cara memberikan dukungan sosial.

Apabila dalam sebuah kelompok antara pemimpin dan anggota sama-sama memperoleh kepuasan maka mereka akan menstabilisasi hubungannya melalui melegitimasi nilai-nilai dan norma-norma. Jadi tidak hanya sekedar bersandar pada perhitungan biaya imbalan dalam hubungan pertukaran mereka. Dengan otoritasnya pemimpin terlindung dari keharusan memberikan imbalan secara terus-menerus kepada anggota kelompok. Walaupun demikian anggota kelompok tetap berutang dan mau patuh pada pemimpin tersebut. Malahan anggota kelompok merasa wajib dan patuh kepada pemimpin agar terhindar dari tuntutan yang mungkin diberikan oleh pemimpin dan menjamin keuntungan tetap diperoleh. Jadi nilai dan norma berfungsi untuk menjamin pertukaran antara pemimpin dan anggota kelompok berjalan secara wajar.

Pada kenyataannya dalam kelompok maupun organisasi, proses legitimasi dapat hancur. Gerakan oposisi yang muncul dapat menggulingkan struktur yang telah mapan. Hal ini pun dapat dijelaskan

dengan menggunakan prinsip-prinsip pertukaran. Dalam bagian selanjutnya kita dengan lebih jelas.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat memperkaya kajian keilmuan dan sebagai perbandingan dalam penelitian. Berikut penelitian terdahulu dibawah ini :

Pertama, M. Hanif Thohari tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul, Perilaku politik santri pada pemilu Legislatif 2014, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, lokasi penelitian dilakukan di kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo. Use the "Insert Citation" button to add citations to this document. Arjo, Jawa Timur, subjek penelitian yang dilakukan menggunakan dua cara yaitu, primer dan sekunder.

Adapun analisis data dilakukan secara diskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Pada penelitiannya menemukan hasil yang memperlihatkan perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014 yang cenderung beragam, dengan pendekatan tindakan sosial yang berbeda yaitu tindakan Tindakan rasional instrumental bisa dilihat pada perilaku politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis. Sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional. Tindakan tradisional ini misalnya dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau simbol agamis saat melakukan kampanye politik

(Jacky, M. Harif Thohari & M, 2015).

Kedua, Yuliansyah, Fathoni, tahun 2017, penelitian dengan judul, Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi pada pemilih pemula di kelurahan Indro Kabupaten Gresik), Universitas Brawijaya. Kriteria pemilih pemula berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah pada saat pemilihan maka kelompok ini dikategorikan sebagai pemilih pemula. Untuk konteks pemilihan legislatif di kabupaten Gresik tahun 2014 yang merupakan momentum dalam menentukan anggota DPRD secara langsung. Terdapat kelompok pemilih pemula yang berjumlah sekitar 895 orang dari 5107 orang yang ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan legislatif kabupaten Gresik tahun 2014.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku pemilih pemula di kelurahan indro pada pemilihan legislatif tahun 2014. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji perilaku pemilih pemula dalam menjustifikasi pilihan politiknya dalam pemilihan legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan dasar penelitian deskriptif analisis. Unit analisis penelitian adalah individu yaitu pemilih pemula. Ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis pemilih pemula memilih karena adanya kesamaan daerah, pendekatan psikologis,

pemilih pemula menjatuhkan pilihannya berdasarkan ikatan emosional terhadap seorang kandidat. Dan pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula memilih kandidat karena program yang ditawarkan serta keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh kandidat tersebut. Kecenderungan perilaku pemilih pemula di kelurahan indro pada pemilihan legislatif tahun 2014 lebih mengarah pada perilaku pemilih yang sosiologis.

Ketiga, Heybert Wirant tahun 2018, melakukan penelitian dengan judul Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) perilaku politik masyarakat Desa Sandana dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Nurjaman (2018) tentang pendekatan utama untuk melihat perilaku politik, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasionalitas.

Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa dari pendekatan sosiologis, masih banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan pilihannya. Faktor kekeluargaan masih mempengaruhi perilaku seorang pemilih terhadap seorang kandidat. Sedangkan dari pendekatan psikologis, masih banyak pemilih menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi dan lebih melihat figur atau kandidat dari calon kepala desa (Wiranto, Heybert, 2018).

Keempat, Rifaldy Sangkoy, Marlien Lopian, Ronny Gosa, Tahun 2019. Dengan judul, Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). Hal yang ingin ditekankan ialah bagaimana perilaku politik khususnya pemilih pemula dalam pelaksanaan kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses voting ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yakni Pendekatan Sosiologi, Pendekatan Psikologis dan Pendekatan Rasional, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan psikologis menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk memenangkan suara masyarakat dimana kedekatan seseorang dengan kandidat menjadi bahan kampanye bagi pasangan calon, melihat figure dari kandidat kepala daerah selain itu, hubungan psikologis dengan suatu organisasi atau partai mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan hak suara, selanjutnya pendekatan rasional, merupakan salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dimana cenderung masyarakat modern

ini lebih pragmatis dan lebih mengutamakan keuntungan dengan mendapatkan uang, sembako (Rifaldy Sangkoy, Marlien Lapian, Ronny Gosal, 2019).

Kelima, Ricafinalia Nur, Sri Erlinda, Zahirman, Tahun 2020, melakukan penelitian dengan judul *Novice Voter Political Behavior in The 2019 Presidential Election In Ungar District Karimun Regenc*, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, penelitian ini adalah Bagaimana perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional.

Tujuan penelitian, Untuk menganalisis dan mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemilih pemula di Kecamatan Ungar yang berjumlah 511 orang.

Sampel pada penelitian berjumlah 84 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix methoad).

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya lebih melihat kepada kedekatan

emosional terhadap partai, asal usul, isu-isu yang berkembang dan latar belakang yang dimiliki oleh kandidat yang mereka pilih. Dengan kata lain faktor pendekatan psikologis memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ungar dalam menjatuhkan pilihan politiknya dalam pemilihan presiden 2019.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	M.Hanif Thohari (2015)	Perilaku politik santri pada pemilu Legislatif 2014	meperlihatkan erilakupolitik santri pada pemilu legislatif 2014 yang cenderung beragam.	Mengkaji pada pelaksanaan pemilu legislatif
2	Yuliansyah, Fathoni, tahun 2017	Politik pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis pemilih pemula memilih karena adanya kesamaan daerah, pendekatan psikologis, pemilih pemula	Penelitian ini membahas bagaimana perilaku pemilih pemula pada Pilkada,

			menentukan pilihannya berdasarkan ikatan emosional	
3	Heybert Wirant (2018)	Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah	Hasil penelitian ditemukan bahwa dari pendekatan sosiologis, masih banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan pilihannya.	Mengkaji perilaku politik dengan menggunakan konsep umum pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4	Rifaldy Sangkoy, MarlienLapian, Ronny Gosa, (2019)	Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi pada pemilih pemula dikelurahan Indro Kabupaten Gresik).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan psikologis menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk memenangkan suara masyarakat dimana kedekatan seseorang dengan kandidat	Menganalisis Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten khususnya pemilih pemula.
5	Ricafinalia Nur, Sri Erlinda, Zahirman, 2020,	Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2019	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah	menganalisis dan mengetahui perilaku politik

		di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Minahasa Selatan)	pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya lebih melihat kepada kedekatan emosional terhadap partai, asal usul, isu-isu yang berkembang	pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2019
--	--	--	---	--

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dari hasil teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang mana kerangka berpikir tersebut digunakan peneliti yang bersifat teoritis perihal masalah-masalah yang menjadi fokus peneliti, menjadi acuan atau dasar menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Pada kerangka pikir tersebut menjadi dasar teori-teori relevan yang sudah jelas tervalidasi kebenarannya.

Kegiatan sistem politik adalah untuk menyeleksi kriteria pemimpin, namun setelah pasca politik berlangsung terjadi suatu fenomena gejala sistem sosial yang tidak seimbang atau menjadi masalah sosial politik yang merupakan produk politik itu sendiri, yang mana demikian hasil produk itu adalah hasil kesepatan masyarakat melalui cara pemilihan kepala desa. Tidak berbeda jauh dengan pemilihan di tingkat desa dan di tingkat Kabupaten/kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat, maka

kesadaran politik pada masyarakat secara garis besar adalah (input) penting yang menghasilkan (output) yaitu lembaga sosial.

Hadirnya Peneliti menyebut istilah (*Broken Politics*) adalah sistem politik yang tidak sehat dan tidak mengikuti etika penyelenggaraan proses pemilu, gejala sosial adalah sebagian dari produk sistem politik itu sendiri perlu dilihat dari berbagai aspek yang dapat memengaruhi, terutama pada pendidikan politik yang kurang mendapatkan perhatiannya dimasyarakat bahkan oleh pemerintah desa, sehingga kegiatan politik cenderung ditafsirkan liar atau diponis cepat yang tidak membawa perubahan yang baik sama sekali, dan menjadi kegiatan serimonial saja.

Memahami dari akar timbulnya problematika sosial adalah perlu mendapat perhatian khusus, hadirnya elit-elit politik juga kian dapat merugikan seperti adanya pemerintah yang tiran di desa, korupsi, mengabaikan hak dan kedudukannya yang telah dipilih oleh rakyat, dilihat dari berbagai masalah seperti gejala sistem sosial, bukan hanya dipengaruhi tekanan satu aspek semata yang ditimbulkan krisis ekonomi, ketiadaan atau kurangnya sumber daya adalah curah dari perhatian politik cenderung masyarakat dilihat sebagai objek saja bukan subjek.

Hasil dari suatu tangkapan data secara empiris peneliti dilapangan membuat pola pikir bahwa, Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada 24 Maret 2022 kecenderungan terjadi pola politik tidak kondusif. Perilaku pemilih pemula adalah sumber masalah yang perlu dianalisis dengan kerangka konsep pikiran secara sistematis dan teoritis.

**GAMBAR, KERANGKA PIKIR**

